



SKPD Diultimatum Laporkan Aset Hingga Desember

Utamanya Dinkes, Disdik dan Bina Marga

PUTUSSIBAU-RK. Sekda Kapuas Hulu, Ir H Muhammad Sukri memberikan tenggat waktu hingga Desember 2014 kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Kapuas Hulu untuk menyerahkan laporan data aset. Hal itu disampaikan Sekda usai memimpin rapat evaluasi pendataan aset pada seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Kapuas Hulu, Jumat di Aula Kantor Bupati setempat, (14/11).

"Kita pun sudah ultimatum seluruh SKPD agar segera memberikan laporan pendataan aset mereka sampai akhir tahun ini," tegas Sukri. Tampaknya Sekda kecewa dengan kinerja SKPD terkait pelaporan data-data aset. Sementara sudah beberapa kali



Rapat evaluasi pendataan aset pada seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Kapuas Hulu, Jumat (14/11). *Ariyong Huanab*

dilakukan sosialisasi dan mengingatkan SKPD untuk segera menyelesaikan masalah aset. "Saya rasa kemauan dari SKPD untuk menyelesaikan masalah aset ini tidak ada," katanya. Namun begitu, Sukri menegaskan kepada seluruh SKPD yang masih banyak belum

melaporkan aset daerah ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kapuas Hulu, segera melaporkannya. "Yang jelas ada tiga SKPD yang menjadi sorotan kita tadi yakni Dinas Kesehatan, Pendidikan dan Bina Marga," ungkapnya.

Pelaporan ini sangat penting. Selama ini, Pemkab Kapuas Hulu sulit meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Jika dalam waktu sampai akhir tahun seluruh SKPD yang masih belum menyampaikan laporan pendataan asetnya, maka ia pesimis Kapuas Hulu bisa mencapai WTP pada tahun ini. "Karena untuk meraih predikat WTP, pengelolaan asetnya juga harus baik, tiga tahun belakangan ini predikat yang kita raih masih WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Dengan adanya ultimatum ini diharapkan SKPD dapat memperbaiki kinerjanya dalam menyelesaikan masalah aset," tegas Sukri.

Di tempat yang sama, Kepala DPPKAD Kapuas Hulu, Drs H Moch Zaini MM, menuturkan,

untuk aset-aset yang ada di SKPD kebanyakan nilai masih nol rupiah. Sehingga untuk predikat WTP pun mustahil bisa diraih Kapuas Hulu.

Zaini pun berharap setelah melakukan evaluasi ini, SKPD-SKPD yang ada dapat berkomitmen bersama dalam menyelesaikan masalah aset. Pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena hanya sebagai koordinator. "Salah satu aset yang dimiliki

Salah satu aset yang dimiliki yaitu tanah. Jumlah aset berupa tanah di Kapuas Hulu sebanyak 1.395 bidang yang terdata, namun hanya 245 saja yang bersertifikat dan 1.150 asetnya tidak bersertifikat atau tidak jelas," demikian Zaini.

LAPORAN: ARMAN HAJRADI
EDITOR: JULIANUS RATNO